

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor : 42 Tahun 1950);
2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Perubahan Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
8. Peraturan Camat Karanganyar Nomor 65-01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Uraian / Rincian Tugas Pegawai Pada Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

B. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan
 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 6. Kelompok Jabatan Pungsional.
2. Tugas Pokok dan Fungsi.
- Sesuai dengan pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya camat (kecamatan) mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;

- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- j. pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
- k. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- l. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
- m. pengkoordinasian operasional tugas cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayahnya;
- n. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, dan pelaporan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian.

Pada akhir tahun 2015 Kecamatan Karanganyar memiliki pegawai sebanyak 16 orang PNS yang terdiri dari 10 PNS SKPD Kecamatan dan 6 Sekretaris Desa PNS. Keberadaan 10 PNS Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	0 orang	0,00%
2	Golongan II	3 orang	30,00%
3	Golongan III	6 orang	60,00%
4	Golongan IV	1 orang	1,00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

b. Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 orang	0,00%
2	SLTP	0 orang	0,00%
3	SLTA	2 orang	20,00%
4	Diploma	2 orang	20,00%
5	S 1 / Akta IV	6 orang	60,00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

c. Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki - laki	6 orang	60,00%
2	Perempuan	4 orang	40,00%
	Jumlah	10 orang	100,00%

d. Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Prosentase
1	IV b	2 orang	28,57%
2	IV a	3 orang	42,86%
3	III b	1 orang	14,29%
4	III a	1 orang	14,29%
	Jumlah	7 orang	100,00%

4. Daftar Aset yang dikelola.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

Secara rinci keberadaan aset SKPD Kecamatan Karanganyar dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pada awal tahun 2015 nilai aset lancar SKPD berupa barang-barang persediaan sebesar Rp. 650.500,- dan pada akhir tahun 2014 nilainya naik menjadi Rp. 7.161.940,-. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 beberapa pembelian aset lancar dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- b. Pada awal tahun 2015 nilai aset tetap SKPD sebesar Rp. 1.025.903.400,- dan pada akhir tahun 2015 nilainya naik sebesar Rp. 156.646.525,- sehingga menjadi Rp. 1.182.549.925,-. Peningkatan nilai aset terjadi karena ;
 - (a) Adanya pengadaan belanja modal sebesar Rp. 130.211.000,-
 - (b) Adanya mutasi aset dari Bagian Organisasi sebesar Rp. 10.000.525,-
 - (c) Adanya pengadaan non belanja modal sebesar Rp. 16.435.000,- yang selanjutnya masuk dalam Kebijakan Akuntansi Daerah (AKD).

Pada akhir tahun 2015 nilai aset SKPD sebesar Rp. 1.189.711.865,- yang terdiri dari :

- a Aset lancar dengan nilai Rp. 7.161.940,- dalam bentuk saldo persediaan Bahan Pakai Habis.
- b Aset Tetap dengan nilai Rp. 1.182.549.925,- dengan perincian ;
 - Tanah : Rp. 0 ,-
 - Peralatan dan mesin : Rp. 428.938.725,-
 - Bangunan dan Gedung : Rp. 742.325.200,-
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 5.136.500,-
 - Aset Tetap Lainnya : Rp. 6.150.000,-
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 ,-

Sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan dari nilai aset yang ada, tidak semuanya dicatat dalam laporan neraca SKPD, namun ada beberapa aset dengan nilai di bawah batas tertentu maka tidak dicatat dalam KIB maupun neraca. Pada Tahun 2015 telah ditetapkan batas nilai kebijakan akuntansi sebagai berikut :

- Peralatan dan mesin : Rp. 499.999,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 9.999.999,-
- Aset Tetap Lainnya
 - Barang bercorak kebudayaan : Rp. 149.999,-
 - Buku : Rp. 49.900,-

Sehingga nilai aset tetap yang dicatat dalam laporan neraca SKPD Kecamatan Karanganyar adalah sebesar Rp. 1.128.684.040,- dengan perincian sebagai berikut :

- Aset Lancar / Persediaan : Rp. 7.161.940,-
- Tanah : Rp. 0 ,-
- Peralatan dan mesin : Rp. 386.580.900,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 723.655.200,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 5.136.500,-
- Aset Tetap Lainnya : Rp. 6.150.000,-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 ,-

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan peraturan mengenai penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pada Tahun 2015 dapat diketahui akumulasi penyusutan aset tetap SKPD Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

• Tanah	: Rp.	0	,-
• Peralatan dan mesin	: Rp.	315.202.380,-	
• Bangunan dan Gedung	: Rp.	87.309.828,-	
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp.	513.600,-	
• Aset Tetap Lainnya	: Rp.	0	,-
• Konstruksi Dalam Pengerjaan	: Rp.	0	,-
	Jumlah	Rp.	403.025.808,-

Perincian penambahan belanja modal, KIB A - F, muasti aset dan akumulasi penyusutan aset sebagaimana terlampir.

5. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Karanganyar adalah salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara berjarak \pm 18 KM dari ibukota kabupaten. Berada di ketinggian \pm 262 m dari permukaan laut yang suhu maximumnya 33⁰ Celcius dan suhu minimum 22⁰ Celcius.

Kecamatan Karanganyar terdiri dari 13 desa, 48 dusun, 47 RW dan 220 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karangjambu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kaligondang dan Mrebet
- Sebelah Barat : Kecamatan Bobotsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Kertanegara

Kecamatan Karanganyar memiliki luas 3.065,86 Ha yang terdiri dari tanah sawah : 1.294,78 Ha (42,37%) dan tanah kering : 1.771,08 Ha (57,63%).

6. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar akhir Tahun 2015 tercatat 41.308 orang yang terdiri dari laki-laki 21.104 (51,09%) dan perempuan 20.204 orang (48,91%).

Menurut mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani yaitu 9.172 orang (31,01 %), kemudian diikuti buruh tani yaitu 4.463 orang (14,96%) dan buruh industri yaitu 2.794 orang (9,32%) sedang selebihnya bekerja di sektor perdagangan, Industri rumah tangga, PNS/TNI/POLRI dan lainnya.

Menurut tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas sebagian besar adalah tamat SD/Sederajat yaitu sejumlah 13.693 (37,49%) sedang yang terkecil mempunyai tingkat pendidikan tinggi (PT) yaitu sejumlah 403 orang (1,09%).

Kemudian menurut keyakinan agama dan kepercayaan sebagian besar adalah memeluk agama Islam yaitu sejumlah 41.290 (99,97%), yang memeluk agama Katholik dan Protestan sejumlah 18 orang (0,03%) sedangkan yang memeluk agama Hindu dan Budha tidak ada.

7. Kondisi Ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan mata pencaharian penduduk. Secara umum kegiatan perekonomian penduduk di Kecamatan Karanganyar merupakan kegiatan sektor ekonomi primer yakni kegiatan perekonomian yang hanya mengambil hasil / produk dari sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan dll). Selain kegiatan sektor ekonomi primer di kecamatan Karanganyar juga terdapat kegiatan ekonomi sekunder. Perdagangan barang dan jasa merupakan kegiatan utama sektor perekonomian sekunder. Di Kecamatan Karanganyar berkembang berbagai macam fasilitas perdagangan dan jasa seperti pasar, pertokoan dan warung-warung, Bank Nasional/daerah, jasa angkutan, bengkel, wartel dll.

Di Kecamatan Karanganyar juga terdapat beberapa industri rumah tangga unggulan diantaranya ; Industri Kasur dan Bantal (Banjarkerta dan Lumpang), Industri makanan (roti, jipang, sale, sriping dll. di Desa Karanganyar, Kalijaran, Bungkanel, Lumpang dan Brakas), Kerajinan Bambu Wulung dan Mebel (Desa Bungkanel). Hasil industri tersebut sebagian besar dipasarkan di lingkup lokal Purbalingga dan khusus kasur dan bantal sudah merambah lingkup nasional dan antar negara.

Untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Karanganyar telah tersedia berbagai fasilitas diantaranya; jaringan jalan dan jenis sarana transportasi (kendaraan), penerangan dan telekomunikasi yang memadai. Semakin tinggi kualitas dan mobilitas perekonomian suatu wilayah maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pendataan terakhir pada Tahun 2014, penduduk Kecamatan Karanganyar apabila dikategorikan berdasarkan tingkat kesejahteraan maka jumlah terbesar penduduknya tergolong dalam Keluarga Sejahtera II yaitu 4.135 KK (33,92%). Adapun perincian per kelompok adalah Pra-KS sebanyak 2.975 KK (24,41%), KS I sebanyak 2.552 KK (20,94%), KS II sebanyak 4.135 (33,92%) KS III sebanyak 2.526 (20,72%) dan KS III Plus sebanyak 2 KK (0,01%).

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang telah dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat sebelum proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 adalah **PURBALINGGA YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN DAN BERAKHLAK MULIA**".

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

- a. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- b. Misi II : Mewujudkan Purbalingga Yang Aman, Damai, Tertib dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Misi III : Mewujudkan Masyarakat Purbalingga Yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme.
- d. Misi IV : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah.
- e. Misi V : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Menodrong Keserasian Pertumbuhan Antar Wilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial.
- f. Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Agar upaya mewujudkan visi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif maka penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 akan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang meliputi Tahap Pemantapan Landasan dan Tahap Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. Pentahapan pembangunan tersebut dimaksudkan agar program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan terfokus pada sasaran dan tujuan-tujuan tertentu sesuai skala prioritas.

C. Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.
- b. Pembangunan Pendidikan.
- c. Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- d. Pembangunan Perdesaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.
- e. Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas.
- f. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
- g. Pengembangan Usaha Perdagangan.
- h. Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan.
- i. Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya.
- j. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- k. Pembangunan Infrastruktur.
- l. Pembangunan Lingkungan Hidup.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2015, SKPD Kecamatan Karanganyar tidak mempunyai target dan realisasi pendapatan

2. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan target dan realisasi pendapatan yang tidak ada maka permasalahan tidak ada dan solusi juga tidak ada.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja.

Pada Tahun Anggaran 2015, SKPD Kecamatan Karanganyar mempunyai Target Belanja sebesar Rp. 1.503.615.000,-. Adapun realisasi belanja SKPD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.460.596.747,- (97,14%) dari yang dianggarkan, sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%). Adapun perincian target dan realisasi belanja SKPD sebagai berikut :

Tabel DPPA dan Realisasi Tahun Anggaran 2015

URAIAN	DPPA	REALISASI	% REALISASI	SISA REALISASI	% SISA ANGGARAN
Belanja Daerah	Rp 1.503.615.000	Rp 1.460.596.747	97,14%	Rp 43.018.253	2,86%
Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan)	Rp 1.074.564.000	Rp 1.040.506.632	96,83%	Rp 34.057.368	3,17%
Belanja Langsung	Rp 429.051.000	Rp 420.090.115	97,91%	Rp 8.960.885	2,09%
Program Peningktn. Kapasitas dan Kualitas Pras. Pem.	Rp 108.000.000	Rp 107.961.000	99,96%	Rp 39.000	0,04%
Peningkatan Lingkungan Kantor Kecamatan	Rp 108.000.000	Rp 107.961.000	99,96%	Rp 39.000	0,04%
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 266.091.000	Rp 257.297.215	96,70%	Rp 8.793.785	3,30%
Penyedia Bahan dan Jasa Perkantoran	Rp 112.033.000	Rp 104.284.489	93,08%	Rp 7.748.511	6,92%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 13.910.000	Rp 13.685.000	98,38%	Rp 225.000	1,62%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp 97.488.000	Rp 96.670.351	99,16%	Rp 817.649	0,84%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Rp 38.660.000	Rp 38.660.000	100,00%	Rp -	0,00%
Penyusunan Dok. Perenc. dan Laporan Kinerja SKPD	Rp 4.000.000	Rp 3.997.375	99,93%	Rp 2.625	0,07%
Program Pengembangan Wilayah	Rp 54.960.000	Rp 54.831.900	99,77%	Rp 128.100	0,23%
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	Rp 54.960.000	Rp 54.831.900	99,77%	Rp 128.100	0,23%

2. Permasalahan anggaran dan solusi.

1) Permasalahan

Target belanja SKPD sebesar Rp. 1.503.615.000,- namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.460.596.747,- (97,14%) sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%) dengan perincian sebagai berikut :

a. Gaji dan tunjangan	Rp. 34.057.368,-
b. Peningkatan Lingkungan Kantor Kec	Rp. 39.000,-
c. Penyediaan bahan dan jasa Perkantoran	Rp. 7.748.511,-
d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp. 225.000,-
e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 817.649,-
f. Monitoring dan Koordinasi Wilayah kec.	Rp. 128.100,-

Sisa lebih anggaran belanja langsung sebesar Rp. 43.018.253,- (2,86%) sebagaimana tersebut di atas terjadi disebabkan antara lain:

- Belanja Gaji dan Tunjangan SKPD sudah diperhitungkan sedetail mungkin sesuai kondisi jumlah pegawai dan sudah diperhitungkan mencukupi anggaran sampai dengan akhir tahun namun ketetapan akhir menjadi kewenangan dinas teknis kabupaten dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga terjadi kelebihan nominal dari yang diusulkan yang pada akhirnya terjadi sisa lebih anggaran yang cukup besar.
- Adanya penghematan belanja telepon, listrik, service, BBM/Pelumas, Pajak Kendaraan, Penggandaan, makanan dan minum rapat, serta belanja perjalanan dinas luar daerah..
- Penyambungan jaringan internet untuk line teleconference tidak terlaksana karena line nomor pada jaringan didepan kecamatan yang sudah habis, sehingga harus menunggu penambahan line nomor internet.

- d) Belanja makan dan minum pegawai / uang makan PNS tidak dapat terserap maksimal karena pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak di beri uang makan harian.

2) Solusi

- a) Menganggarkan belanja gaji dan tunjangan lebih akurat lagi sehingga tidak terjadi kelebihan anggaran.
- b) Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran sehingga target anggaran belanja nantinya dapat terserap maksimal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

SKPD Kecamatan Karanganyar belum ada penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) - nya maka tingkat pencapaian yang dilaporkan adalah penjelasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana lampiran laporan pertanggungjawaban ini.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2015 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Karanganyar meliputi :

a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan.

1) Peningkatan Lingkungan Kantor Kecamatan.

Realisasi program dan kegiatan dimaksud yaitu terbangunnya mushola. Ruang arsip, WC dan Dapur di lingkungan kecamatan dengan anggaran Rp. 108.000.000,- dan realisasi Rp. 107.961.000 (999,96%).

Tidak ada permasalahan dalam peningkatan lingkungan kantor kecamatan.

Solusi : tidak ada.

b. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

1) Penyedia Bahan dan Jasa Perkantoran

Realisasi pelayanan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran meliputi ; honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium pengelola keuangan SKPD, belanja ATK, belanja alat listrik dan elektronik, belanja prangko, meterai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan, belanja bahan

bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung gas, belanja bendera, belanja perlengkapan rumah tangga, belanja telepon, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah, belanja internet, belanja jasa transaksi keuangan, belanja dokumentasi, belanja publikasi, belanja cetak, belanja pengadaan, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja makanan dan minuman tamu dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 112.033.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.284.489,- (93,08%).

Tidak ada permasalahan dalam penyediaan bahan dan jasa perkantoran.

Solusi : tidak ada.

2) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Realisasi pelayanan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sejumlah 231 kali dan perjalanan dinas luar daerah sejumlah 6 kali. Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.910.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.685.000,- (98,38%).

Tidak ada permasalahan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

Solusi : tidak ada.

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelayanan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya 3 unit gedung, 2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan dinas roda 2 dan peralatan kantor lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.488.000,- realisasi sebesar Rp. 96.670.351,- (99,61%).

Tidak ada permasalahan dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor.

Solusi : tidak Ada.

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Realisasi pelayanan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pengadaan ; 1 buah mesin absensi, 1 buah lemari kaca, 1 set vertical blind, 1 buah meja rapat, 1 unit AC, 1 set Mix teleconference, Webcam dan speaker aktif, 33 buah kursi rapat, 2 duah papan SOP, 1 buah rak TV, 1 buah papan kehadiran pejabat, 2 buah dispenser, 2 rak plastik dan 1 buah almari plastik dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 38.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.660.000,- (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor.

Solusi : tidak ada.

c. Program Pengembangan Wilayah

1) Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan

Realisasi pelayanan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya monitoring dan koordinasi wilayah kecamatan dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 54.960.000,- yang diarahkan untuk honorarium Tim Pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja perlengkapan rumah tangga, belanja bahan baku bangunan, belanja jasa dekorasi, belanja penggandaan, belanja sewa tenda, belanja sewa sound system, belanja makan dan minum rapat, belanja pakaian batik tradisional, belanja pakaian seragam organisasi dan belanja perjalanan dinas dengan realisasi sebesar Rp. 54.831.900,- (99,77%).

Tidak ada permasalahan dalam monitoring dan koordinasi wilayah kecamatan.

Solusi : tidak ada

3. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Karanganyar mengacu pada RPJMD dan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Proses perencanaan SKPD diawali dengan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang dilaksanakan pada sekitar bulan Januari - Pebruari tahun n-1. Setelah itu disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sekitar bulan September - Oktober dengan mengacu pada rencana kerja yang telah ditetapkan.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh SKPD dalam melaksanakan masing-masing kegiatan pada umumnya dinilai cukup baik. Sarana prasarana yang ada di SKPD Kecamatan Karanganyar meliputi peralatan dan mesin, gedung, jaringan dan aset tetap lainnya. Adapun aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak ada.

5. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Karanganyar dapat disampaikan beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut :

A. Status Kepemilikan Aset Tanah.

Tanah yang digunakan untuk gedung kantor dan bangunan lainnya di kompleks Kantor Kecamatan Karanganyar bukan merupakan aset SKPD. Status kepemilikannya juga tidak jelas karena tidak ada bukti administrasi kepemilikannya baik di Desa Karanganyar maupun Kantor Kecamatan Karanganyar, sementara Pemerintah Desa Karanganyar pernah menganggap tanah tersebut milik desa.

Solusi

Meminta bantuan Pemerintah Desa untuk menelusuri asal usul tanah dan dapat menunjukkan bukti administrasi kepemilikan tanah tersebut. Apabila terbukti sebagai tanah desa maka jika memungkinkan kami mengusulkan bisa dibeli oleh Pemerintah Daerah dan bersertifikat sebagai aset Pemerintah Daerah.

B. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Permasalahan

Pelunasan PBB Tingkat Kecamatan pada tanggal jatuh tempo. Hal tersebut dikarenakan antara lain ; adanya penyampaian beberapa SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Desa menyampaikan kepada wajib pajak terlambat dan warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar serta kurangnya kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak, uang penarikan sebagian **dipinjam** terlebih dahulu oleh pemungut itu sendiri

Solusi

Membentuk Tim Monitoring PBB dan mengadakan pembinaan dan intensifikasi pelunasan PBB ke desa-desa

C. Musyawarah Pembangunan Kecamatan

Permasalahan

Prioritas pembangunan masyarakat dan desa setiap tahunnya yang sudah diusulkan melalui musrenbangdes dan dilanjutkan dalam musrenbnag kecamatan akan tetapi hanya sekitar 10% s.d 15% saja yang dapat termuat dalam APBD yang pelaksanaannya oleh Dinas Teknis Tingkat Kabupaten. Dengan kondisi seperti itu banyak usulan prioritas pembangunan yang tidak dapat terdanai atau dikerjakan.

Solusi

Memfasilitasi pemerintah desa agar mengupayakan / mengusulkan pelaksanaan program / proyek melalui anggaran dari Provinsi atau Pusat.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan

Selama lima tahun terakhir 6 orang PNS Kecamatan Karanganyar telah memasuki masa pensiun namun sampai dengan saat ini masih belum ada penambahan pegawai. Dengan kondisi demikian beberapa tugas pekerjaan rutin kecamatan tidak ada yang menanganinya.

Solusi

Membebankan tugas pekerjaan rutin kepada karyawan yang ada serta mengusulkan penambahan karyawan di Kantor Kecamatan Karanganyar kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.

6. Hal Lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak menerima tugas pembantuan.

- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak memberikan tugas pembantuan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah.
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak menyelenggarakan Kerja sama Antar daerah.
- B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak menyelenggarakan kerjasama dengan Pihak Ketiga..
- C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Karanganyar senantiasa mengadakan konsultasi dengan instansi vertikal dan koordinasi dengan jajaran instansi tingkat kecamatan serta dengan desa-desa.
- D. Pembinaan Batas Wilayah.
1. Sengketa batas wilayah Desa dan Kecamatan.
Selama tahun 2015 tida ada sengketa batas wilayah desa dan kecamatan.
 2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian.
Tidak ada solusi.
 3. SKPD penyelenggara pembinaan batas wilayah.
SKPD penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga).
 4. Permasalahan dan solusi
Tidak ada permasalahan. Tidak ada solusi.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.

Kecamatan Karanganyar merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) berbukit-bukit dan khususnya untuk wilayah bagian utara berbatasan langsung dengan pegunungan. Dengan kondisi wilayah tersebut maka Kecamatan Karanganyar merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana karena faktor alam seperti ; banjir, anging ribut, tanah bergerak dan tanah longsor. Sedangkan bencana alam yang disebabkan oleh faktor non alam yang beberapa kali terjadi adalah bencana kebakaran rumah dan kejadian penderes jatuh dari pohon kelapa. Rekapitulasi kejadian bencana di wilayah Kecamatan Karanganyar dan bantuan yang diterima pada tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Kecamatan Karanganyar dalam rangka upaya pencegahan bencana tersebut adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana melalui rapat-rapat di tingkat kecamatan dan desa.
- b. Melakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana.
- c. Melaporkan kejadian bencana ke tingkat kabupaten (Bupati, Kabag Kesra, BPBD, dan PMI).
- d. Memfasilitasi penyaluran bencana kepada para korban / ahli warisnya.

2. Status Bencana.

Status bencana yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Karanganyar merupakan bencana lokal / kabupaten.

3. Sumber dan jumlah anggaran.
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki anggaran khusus pencegahan dan penang-gulangan bencana. Namun dalam pelaksanaannya di kecamatan disediakan dana siaga yang bersumber dari PMI Kabupaten Purbalingga namun jumlahnya sangat terbatas selanjutnya beberapa waktu kemudian menyusul bantuan dari Pemerintah Daerah Purbalingga (Bagian Kesra).
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana.
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana melalui rapat-rapat di tingkat kecamatan dan desa.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana.
 - c. Menginformasikan nomor-nomor telepon penting SKPD tingkat Kabupaten dalam rangka penanggulangan bencana (khususnya BPDB untuk bencana alam kebakaran).
5. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.
Untuk wilayah Kabupaten Purbalingga lembaga yang khusus dibentuk menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga.
6. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Karanganyar setiap tahunnya adalah Angin Ribut, Tanah Longsor dan Banjir.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

1. Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah.
Kecamatan Karanganyar tidak memiliki kawasan khusus.

2. Sumber Anggaran
Kecamatan Karanganyar tidak memiliki anggaran pengelolaan kawasan khusus.
3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
Tidak ada permasalahan. Tidak ada solusi.

G. Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum .

1. Gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).
Pada tahun 2015 tidak ada gangguan yang terjadi.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Purbalingga adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai kepanjangan tugas untuk tingkat kecamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan satuan pengamanan di tiap-tiap desa.
3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.
Pada SKPD Kecamatan Karanganyar yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban adalah Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban Umum (Pemtrantibum) yang sekaligus membawahi Satpol PP Kecamatan.
4. Sumber dan jumlah anggaran.
SKPD Kecamatan Karanganyar tidak memiliki anggaran khusus penyelenggaraan keamanan dan ketertiban.
5. Penanggulangan dan kendalanya
Dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan terhadap kemandirian dan ketertiban masyarakat Seksi Pemtrantibum tentunya

selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polsek dan Koramil serta satuan pengamanan desa-desa.

Kendala tidak ada.

6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.
 - a. Melaksanakan pengamanan Lebaran, Natal, Tahun baru dan Tamu Kabupaten. bersama dengan Polsek dan Koramil.
 - b. Melaksanakan razia tempat-tempat yang rawan digunakan sebagai tempat minum-minuman keras, bersama dengan Polsek dan Koramil.
 - c. Melaksanakan cek ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan Polsek dan Koramil.

BAB VII
P E N U T U P

Demikian Laporan Pertanggungjawaban SKPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2015

. Dengan laporan ini mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar selama kurun waktu satu tahun anggaran dan semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD pada tahun yang akan datang.

Karanganyar, 25 Januari 2016

CAMAT KARANGANYAR

Drs. MOHAMMAD NAJIB

Pembina Tingkat I

NIP 19651215 199302 1 010

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Daftar pegawai meliputi nama, nip, jabatan, pangkat dan golongan, kualifikasi pendidikan, umur, jenis kelamin, agama, diklat struktural dan fungsional yang pernah diikuti (serta pembagian pegawai per bidang, sub bidang, sub bagian, seksi dst) keadaan per Desember 2015.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Tahun Anggaran 2015.
3. Dokumen aset : KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Bangunan dan Gedung), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), dan KIB E (Aset Tetap Lainnya, keadaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.
4. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan